The Prospect and Threat of ASEAN Economic Community to The Trajectory of Rural Development in West Java

Ari Ganjar Herdiansah
Wahyu Gunawan
Muhamad Fadhil Nurdin
R.A. Tachya Muhamad

PAPER
Presented in USM International Conference on Social Sciences 2015,
Paradise Rainbow Beach Resort, Penang
27-28 August, 2015

PENANG - MALAYSIA 2015

The Prospect and Threat of ASEAN Economic Community to The Trajectory of Rural Development in West Java

Ari Ganjar Herdiansah[1], Wahyu Gunawan[2] Muhamad Fadhil Nurdin[3a], and R.A. Tachya Muhamad[4]

Abstract

ASEAN Economic Community (AEC) that takes effect immediately will transform ASEAN into a region with free movement of goods, services, investments, skilled labor, and capital flow. One of the goals is to construct economic cooperation which brings benefits to communities across Asean. Hopefully it would also have positive impact on rural areas in West Java which hold many problems such as poverty, inequality, and environment degradation. As an opportunity, AEC can be exploited in improving the living standards of rural communities. For example, there would be broadening market place for the agricultural sector due to Asean level investor intervention. However, the enforcement of the AEC can also bring threats. The cooperation would not necessarily based on equal relationship regarding the large companies behavior always focuses on profit seeking. When this happen, aspects of the society welfare could not be achieved, the environment would be damaged, and the inequality would rise. Therefore the AEC forum and the local government req uire necessary efforts to orient the program in favor of poverty reduction, inequalities elimination, and environmental preservation.

Keywords: AEC, rural, development, poverty, community, environment.

Pendahuluan

Economic ASEAN Community [ASEAN] digagas pada Januari 2007 pada acara the Twelf Summit di Cebu dan diberlakukan pada 2015. Gagasan ini untuk mengintegrasikan aktivitas ekonomi di negara-negara ASEAN untuk mempromosikan ketahanan ekonomi regional dan menjamin ketersediaan barang-barang publik. Dengan demikian, diharapkan negara-negara ASEAN memiliki daya saing di tingkat internasional, terutama menghadapi ekspansi ekonomi India dan China. Ketahanan ekonomi yang dimaksud didasarkan pada prinsip liberalisasi, reformasi, dan kerjasama ekonomi (Plummer & Yue, 2009b: 1). Dalam blue print, tujuan diberlakukan AEC antara lain menciptakan basis produksi dan pasar ekonomi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing, kawasan pembangunan ekonomi yang berkesetaraan, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global [Asean Studies Centre, 2009: 4).

Keuntungan yang diharapkan dari diberlakukannya AEC antara lain terciptanya kesejahteraan regional, stabilitas, dan keseteraan. Terdapat tantangan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hambatan pertama adalah pada aspek politik, seperti pemberlakuan NAFTA di Eropa yang harus melalui proses ratifikasi dan administrasi dari Amerika Serikat. Terdapat kelompok-kelompok yang memberlakukan proteksi ekonomi dan merasa terancam dengan adanya integrasi aktivitas ekonomi regional. Kedua, perlu adanya distribusi menyeluruh dari hasil keuntungan pemberlakuan AEC. Artinya, seluruh negara

[1] -2.3.[4] Lecturer atDepartement of Sociology, Padjadjaran University, West Java, Indonesia; [3a] School of Social Sciences - University of Sains Malaysia.

anggota sama-sama mendapatkan keuntungan dari AEC meskipun terdapat pengukuran yang berbeda di setiap negara. Selain masalah pemerataan distribusi pendapatan, juga perlu diatasi masalah pembangunan sosial (Plummer &Yue, 2009a: 164-165].

Kesiapan masyarakat lokal dalam memberlakukan AEC belum pernah menjadi topik yang serius dibicarakan. Topik-topik seputar menuju AEC lebih banyak membahas kesiapan manajemen bisnis, politik dan pemerintahan serta kekuatan ekonomi dalam lingkup masing-masing negara. Seperti yang diutarakan oleh Pushpanathan, tantangan penerapan AEC antara lain proses integrasi ASEAN menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, peningkatan capacity building di negara yang menerapkan komitmen, perlunya mekanisme pengawasan terhadap resiko-resiko yang muncul dalam pemberlakuan AEC, dan pembangunan dan finansial pasar tunggal ASEAN (Pushpanathan, 2012:16-17).

Salah satu gagasan utama dari AEC adalah menciptakan single market yang terinspirasi dari pemberlakuan The Single European Act pada tahun 1987. Single market merupakan kebijakan "satu harga" di suatu kawasan yang tiada batasan geografis internal sehingga membebaskan alur pergerakan barang, orang, pelayanan, dan modal. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi dan hukum di negara-negara anggota seperti menyangkut standar produk pangan, kesehatan dan keselamatan (Lloyd, 2007: 16-17).

AEC dimaksudkan untuk mereduksi kemiskinan di Asia Tenggara. Kemiskinan masih menjadi masalah yang melanda negara-negara ASEAN, terutama Vietnam, Indonesia, Philippines, dan Kamboja. Terdapat sekitara 99 juta jiwa dengan pendapatan yang tidak mencukupi memenuhi kebutuhan dasar. Ketika perdagangan bebas diberlakukan, penduduk miskin sangat rentan menghadapi gegaran eksternal. Namun, data menunjukkan globalisasi senantiasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap negara dengan keterbukaan ekonomi dibanding yang terutup. Kebebasan pergerakan barang, jasa, dan modal, (2) kebebasan pergerakan tenaga kerja, (3) kebebasan pergerakan turis ke seluruh wilayah Asean, (4) Platform produk-produk regional. Dengan demikian, integrasi ekonomi melalui AEC perlu dipertimbangkan sebagai solusi mengurangi kemiskinan (Asra, Estrada, & Pernia, 2005: 281-243).

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia. Penduduknya mencapai 44,5 juta jiwa dengan penduduk miskin sebensar 9,89 persen pada tahun 2012. Sebagian besar wilayah Jawa Barat adalah pedesaan, dengan jumlah desa sebanyak 5.316, sedangkan ciri perkotaan yang direpresentasikan oleh kelurahan hanya berjumlah 638 (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2014). Jawa Barat juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena lokasinya yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta. Kondisi tersebut menyebabkan Jawa Barat sebagai kawasan strategis bagi pertumbuhan industri, perdagangan, dan sektor jasa. Karena itu, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan dengan daya tarik investasi luar negeri yang tinggi. Namun demikian, meskipun memiliki potensi yang besar, Jawa Barat masih dirundung masalah akibat dampak pembangunan antara lain kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan terutama di pedesaan. Jumlah penduduk miskin pada 2014 sebanyak 4.230.000 jiwa yang atau 9,18 persen dengan jumlah pengangguran 8,4 persen dari total penduduk (BPS, 2014b).

Dengan rencana pemberlakuan AEC pada akhir 2015, terdapat harapan bahwa kawasan single market akan memicu peningkatan kesejahteraan di desa-desa Jawa Barat. Namun pandangan bahwa adanya pasar tunggal dan sistem ekonomi terintegrasi akan membawa kesejahteraan di daerah masih diperdebatkan. Brewster (2013: 297] mempertanyakan siapakah yang lebih diuntungkan dengan pemberlakuan pasar tunggal? Apakah perusahaan multinasional yang memiliki modal besar dan cakupan bisnisnya melintasi kawasan-kawasan? Akankah pedagang lokal juga akan mendapatkan keuntungan? Apakah dengan semakin aktifnya perdagangan regional dapat mengatasi pengangguran di tingkat lokal dan berkontrobusi terhadap perbaikan ekonomi nasional? Tidak ada jaminan bahwa dengan integrasi sistem ekonomi akan membawa benefit terhadap masyarakat lokal.

Sebelum AEC diberlakukan pada ujung 2015, Jawa Barat sudah menjadi kawasan sentra pembangunan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, produk, jasa, dan modal asing. Berbagai perusahaan multinasional di bidang sumber daya alam, perdagangan, pertanian, dan jasa sudah lama menjalankan usahanya di Jawa Barat. Kawasan pedesaan tidak terlepas dari proses pembangunan karena lokasinya yang berada di sekitar sumber daya alam, ketersediaan lahan yang masih luas, dan sumber tenaga kerja murah. Meskipun demikian, pembangunan tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan kondisi desa yang diliputi kemiskinan, pemerintah provinsi Jawa Barat dalam visi pembangunannya memasukan agenda untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dan regional. Beberapa programnya antar lain pembangunan infrastruktur pertanian, penumbuhan badan usaha desa berkualitas, revitalisasi pasar desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberian bantuan modal bergulir, dan pembangunan sarana distribusi pemasaran kegiatan ekonomi (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2014).

Paper ini berupaya menganalisis bagaimana prospek dan ancaman pemberlakuan AEC bagi pembangunan desa di Jawa Barat dengan menekankan pada tiga isu masalah yaitu kemiskinan, kesenjangan, dan lingkungan. Meskipun AEC merupakan program integrasi aktivitas ekonomi, tetapi analisis dari perspektif sosiologis diperlukan untuk melihat kesiapan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Jawa Barat. Untuk membedah kondisi empiris, dilakukan penggalian secara kualitatif terhadap tiga desa sebagai contoh kasus yang menggambarkan adanya geliat kegiatan ekonomi tetapi masih berkutat dengan masalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan. Ketiga desa yang dijadikan kasus adalah Desa Sindang Pakuon di Kabupaten Bandung dan Desa Cipacing serta Desa Cisempur di Kabupaten Sumedang. Di samping itu, penjelasan menggunakan data statistik antara lain indeks gini Jawa Barat dan laju penanaman modal asing untuk melihat kecenderungan secara umum.

Pembangunan dan Kemiskinan: Tinjauan Konseptual

Pembangunan ekonomi dapat mengancam lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal, sehingga penduduk miskin banyak yang tinggal dalam lingkungan yang buruk. Standar hidup golongan miskin pun semakin memperburuk kualitas ekosistem (Mumraa & Smith, 2012: 1). Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi membawa dampak ketidakseimbangan, karena campur tangan dari luar terlah mendorong perubahan ekonomi dari dalam. Dalam proses tersebut

terjadi adaptasi masyarakat terhadap pola yang baru. Sisi supply yang perlu diperhatikan antara lain penggabungan peralatan produktif termasuk pengenalan barang dan metode produksi yang baru, yaitu produk dan proses inovatif, pembukaan pasar baru, pemanfaatan bahan mentah baru, dan menjalani metoda organisasi ekonomi yang baru (Hageman, 2009: 255-256).

Pembangunan ekonomi tidak selalu berkorelasi dengan penghapusan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan justru cenderung merusak lingkungan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi dan pembuatan keputusan, proses tersebut diistilahkan environmental mainstreaming. Menanggapi masalah kemiskinan yang terabaikan dalam pembangunan ekonomi, terdapat konsep yang mengintegrasikan pengentasan kemiskinan dengan pelestarian lingkungan atau poverty-environment mainstreaming. Konsep tersebut menghubungkan pembuatan keputusan, budjeting, dan proses implementasi di tingkat nasional maupun daerah. Upaya ini bersifat multi-year dan multi-stakeholder yang bekerja dengan aktor-aktor pemerintahan, aktor-atktor non pemerintahan, dan aktor-aktor pembangunan (Coninck, 2009: 6).

Masyarakat Desa di Tengah Invasi Modal

Bahwa selama ini intervensi modal dari luar Jawa Barat sudah berlangsung. Akan tetapi, tidak membawa dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Barat. Bahkan yang terjadi sebaliknya, industrialisasi yang terus berkembang dan mendesak ke kawasan pedesaan membuat masyarakat desa kehilangan pekerjaannya, bukannya terserap pada sektor industri. Hal tersebut terjadi karena kualitas tenaga kerja yang kurang memenuhi standar yang dibutuhkan oleh industri. Tingkat pendidikan masih rendah. Masih banyak penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama. Pada kasus di Desa Sindang Pakuon, Kabupaten Bandung, di sana berdiri beberapa pabrik tekstil, tetapi tenaga kerja yang diserap hampir semua berasal dari luar desa tersebut. Operasional pabrik tekstil membutuhkan keahlian tertentu dan beragam, misalnya pekerja berlatar pendidikan minimal sekolah menengah tingkat atas kejuruan atau teknik, sarjana bidang keuangan, manajemen, dan industri. Sementara itu, penduduk Desa Sindang Pakuon kebanyakan bekerja sebagai petani dengan latar belakang pendidikan angkatan kerja sekolah menengah tingkat pertama. Karena itu, angkatan kerja di desa tersebut banyak yang tidak terserap ke lapangan kerja yang tersedia di pabrik-pabrik tekstil.

Keberadaan pabrik-pabrik tekstil di Desa Sindang Pakuon memicu berdirinya usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan para pekerja pabrik yang membludak. Supermarket, warung makan, dan toko-toko menjamur untuk menyediakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh pekerja pabrik maupun masyarakat yang semakin padat. Rumah kontrakan atau kos-kosan banyak dibangun sebagai tempat tinggal para pekerja. Pusat perbelanjaan dan toko peralatan elektronik didirikan untuk menyediakan kebutuhan sandang, hiburan dan komunikasi para pekerja. Harga jual tanah dan bangunan di Desa yang lokasinya dekat dengan pabrik semakin tinggi. Para pemilik lahan tidak lagi tertarik untuk menjadikan tanahnya digarap untuk keperluang pertanian. Mereka terdorong untuk menjual aset tanah kepada para pengusaha atau jika

memiliki modal, mereka akan mengubah aset atau lahan menjadi rumah kontrakan atau toko. Dengan cara seperti itu, mereka mendapatkan keuntungan finansial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bercocok tanam.

Bagi penduduk yang tidak memiliki modal, mereka cenderung menjual asetnya dan pindah ke tempat lebih terpencil. Para penduduk angkatan kerja yang tidak terserap oleh industri tekstil menambah jumlah pengangguran. Mereka pun terdorong untuk berpindah ke kota-kota untuk bekerja serabutan, misalnya jadi pengemis, pengamen, atau bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima. Sedangkan bagi penduduk desa yang tinggal di lokasi yang kurang strategis, atau tidak terpengaruh secara ekonomi oleh keberadaan pabrik, harus tetap bertahan dengan mata pencaharian petani. Namun di sisi lain, produktivitas lahan pertanian menjadi berkurang akibat alih fungsi lahan sebagian wilayah pedesaan. Contohnya, dengan adanya pabrik, air tanah menjadi meyusut dan warga kesulitan untuk memenuhi air untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-harinya. Dengan diubahnya lahan pertanian menjadi bangunan pertokoan atau pemukiman untuk kos-kosan, saluran irigasi terhambat sehingga aliran air ke lahan pertanian yang tersisa menjadi tersumbat. Akibatnya, produktivitas pertanian menjadi turun yang menyebabkan pendapatan petani menjadi berkurang.

Di samping itu, hasil produk pertanian kurang bersaing dengan produk pertanian serupa yang berasal dari luar daerah maupun impor. Contoh, para pedagang lebih memilih cabai dan bawang yang berasal dari Jawa Tengah karena harganya lebih murah dan kualitas lebih baik. Produk mereka pun hanya bisa dijual di pasar-pasar tradisional lokal. Karena, supermarket memiliki standar tinggi untuk menerima produk sayuran, antara lain bebas pestisida dan harus menggunakan pupuk organik. Keterbatasan teknologi dan modal membuat para petani di Desa Sindang Pakuon tidak bisa memenuhi standar yang sudah banyak ditetapkan di pasar-pasar modern. Akibatnya, kondisi ini semakin mendorong meningkatnya angka penduduk miskin di pedesaan.

Pada kasus di Desa Cipacing Kabupaten Sumedang para penduduknya banyak bermata pencaharian sebagai pengrajin produk pariwisata, seperti lukisan, patung, ukiran, dan alat musik tradisional. Produk yang dihasilkan pengrajin di Desa Cipacing sudah dipasarkan ke hampir seluruh dunia, seperti Australia, German, Arab Saudi, dan Jepang. Akan tetapi meskipun mereka sudah terlibad di dalam sistem perekonomian internasional, rata-rata keadaan ekonominya rendah dan hampir berada di bawah garis kemiskinan. Ketidakmampuan mereka untuk mengembangkan usaha disebabkan sistem tengkulak yang memaksa para pekerja mendapatkan upah murah. Banyaknya tangan dalam pemasaran produk menyebabkan harga barang di tingkat pengrajin sangat rendah.

Kondisi seperti diurai di atas berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi penjual atau distributor produk kerajinan dari Desa Cipacing. Mereka dapat meraup keuntungan yang banyak karena ada margin yang cukup besar dari harga produk di pengrajin dengan harga retail. Selain itu, para tengkulak atau pedagang besar sering kali mendapatkan suntikan modal dari pedagang dari negara lain dengan jumlah yang besar. Namun, suntikan modal tersebut hanya menghasilkan ketuntungan yang berlipat bagi para pedagang, sedangkan bagi para pengrajin penghasilannya tetap hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari secara subsiten. Pada saat ini, terjadi pola hubungan ketergantungan para

pengrajin lokal di Desa Cipacing terhadap para pedagang baik lokal maupun internasional. Para pedagang dap at mempermainkan harga demi keuntungan mereka, sementara para pengrajin tidak memiliki pilihan lain karena kemampuan mata pencaharian mereka secara turun temurun hanya ada di bidang produk kerajinan.

Mempertimbangkan keadaan yang tidak lagi memiliki prospek yang bagus, para pemuda atau angkatan kerja di Desa Cipacing tidak tertarik untuk meneruskan tradisi bekerja sebagai pengrajin. Mereka yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah lebih memilih pergi ke kota atau ke tempat lain untuk bekerja sebagai buruh pabrik atau karyawan toko. Akibatnya, saat ini para pengrajin di Desa Cipacing kebanyakan para orang tua atau mereka yang tidak memiliki kemampuan yang layak untuk bekerja di sektor industri. Desa Cipacing memiliki potensi produk kerajinan tangan yang telah memiliki pasar internasional. Dengan adanya bangunan ekonomi baru yang didorong oleh AEC, bisa saja terjadi eksploitasi pengrajin lokal yang semakin parah. Sebab, para tengkulak memiliki pangsa pasar yang semakin terbuka. Namun, meningkatnya peluang tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf kesejahteraan pengrajin karena semakin menambah tingkat ketergantungan pengrajin kepada tengkulak.

Contoh kasus di Desa Sindang Pakuon dan Desa Cipacing merupakan cerminan kecenderungan yang terjadi secara umum di desa-desa lain di Jawa Barat. Keterbukaan ekonomi, sistem pasar, dan invasi kapital tidak serta merta berpengaruh terhadap meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah penduduk miskin justru bertambah. Misalnya pada tahun 2011 terjadi pertambahan penduduk miskin terutama di pedesaan. Bertambahnya penduduk miskin diakibatkan urbanisasi dan tingginya angka pengangguran (Beritasatu.com, 2012). Dengan berlakunya AEC, diharapkan dapat menggairahkan lagi sektor industri yang menghasilkan produk-produk unik dan inovatif di desa-desa dengan potensi seperti di Cipacing. Pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan pelaku usaha perlu menjadikan potensi Desa Cipacing sebagai prospek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengrajin dengan pendekatan poverty-environment mainstream.

Kesenjangan di Pusat Kawasan Pembangunan

Secara umum Indonesia mengalami peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Jawa Barat pun termasuk provinsi yang mengalami peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data rasio gini yang terus meningkat semenjak 1996 hingga 2013.

Tabel 1 Rasio Gini dan Jumlah Penduduk di Jawa Barat

Tahun	Rasio Gini
1996	0,356
1999	0,286
2002	0,289
2005	0,336
2007	0,344
2008	0,35

2009	0,36
2010	0,36
2011	0,41
2012	0,41
2013	0,411

(BPS, 2014a)

Pada tahun 1996 indeks rasio di Jawa Barat sebesar 0,356 yang artinya ketimpangan pendapatan penduduk berada masih pada batas normal atau setara dengan indeks gini nasional. Akan tetapi pada 2013, terjadi kenaikan indeks gini menjadi 0,411 yang menandakan terjadi peningkatan kesenjangan ekonomi di antara penduduk di Jawa Barat. Peningkatan indeks gini sejalan dengan peningkatan arus modal ke Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat penanaman modal asing tertinggi tingkat nasional. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan penanaman modal asing dari USD 6.561.946.400 pada 2013 menjadi USD 7.124.879.970 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 311.261 pekerja Qabarprov.go.id, 2015]. Artinya, meskipun modal asing masuk dan memicu pembangunan ekonomi, tetapi profit dan benefitnya tidak diperoleh secara merata oleh seluruh penduduk.

Dengan diberlakukannya AEC, investasi Jawa Barat diperkirakan akan semakin bertambah. Hal ini disebabkan Jawa Barat telah menjadi daya tarik dan memberikan pelayanan yang baik terhadap investasi asing. Dari sisi infrastruktur, Jawa Barat terbilang yang paling siap dibandingkan dengan daerah lain. Kedekatannya dengan Jakarta dan menjadi jalur penghubung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi keuntungan strategis Jawa Barat bagi investor. Akan tetapi, melihat kecenderungan yang terjadi terutama di desa-desa, masuknya modal dikhawatirkan semakin meningkatkan kesenjangan pendapatan. Apalagi, arus modal yang tinggi yang dibarengi dengan perangkat sumber daya manusia dan teknologi dari luar. Daya tarik investasi tidak sepatutnya hanya menekankan pada aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia murah di pedesaan, tetapi dengan momen AEC, pemerintah perlu mengedepankan investasi yang dapat mengembangkan potensi masyarakat lokal. Dengan begitu, desa-desa akan mendapatkan manfaat kesejahteraan dari pemberlakuan AEC.

Industrialisasi, Lingkungan, dan Sumber Daya Manusia

Saat ini kerusakan lingkungan di Jawa Barat semakin parah. Menurut catatan Walhi, sebanyak 400 perusahaan telah mencemari Sungai Citarum yang tersebar di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Adanya praktik alih fungsi lahan konservasi di kawasan lindung di hulu sungai untuk keperluan hotel, apartemen, villa, dan properti komersil lainnya yang diberi izin oleh pemda setempat. Terjadi eksploitasi di kawasan geothermal di kawasan konservasi dan lindung. Sedikitnya terdapat 7 perusahaan di Taman Nasional Halimun Salak, Papandayan, Gunung Wayang Windu, Taman Nasional Gunung Ciremai, dan Gunung Tangkuban Parahu (Bandung.bisnis.com, 2014].

Pada 2012, terjadi sekitar 360 jumlah pengaduan kasus lingkungan hidup di Jawa Barat. Sementara itu, kasus-kasus yang terjadi sebelumnya belum tertangani oleh pemerintah. Dampaknya, banjir dan kekeringan menjadi bencana

yang terjadi secara reguler di Jawa Barat (Pikiran-rakyat.com, 2012). Dari 26 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, sebanyak 17 kabupaten/kota di antaranya telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam terutama longsor dan banjir. Terdapat 1.068 desa dari keseluruhan 4.004 desa yang rawan dilanda bencana tersebut (Diskominfo.jabarprov.go.id, 2009). Hingga pertengahan Desember 2003 dari seluruh bencana tanah longsor di Indonesia, 70 persennya terjadi di Jawa Barat. Bencana tersebut diakibatkan perubahan ekosistem di mana terjadi eksploitasi terhadap hutan (Mangunjaya, 2006: 10).

Kerusakan lingkungan akibat industrialisasi dan deforestasi di Jawa Barat salah satu yang menonjol terjadi di Desa Cisempur Kabupaten Sumedang. Desa ini terletak di kaki Gunung Puteri dan di lalui oleh jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bandung dengan kota-kota lain di sebelah selatan Jawa Barat serta menjadi jalur antarprovinsi ke Jawa Tengah. Pada awalnya penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 1980 datang pemodal membeli lahan sawah dan pemukiman penduduk untuk dibangun pabrik tekstil. Sejak saat itu, terjadi ketidakseimbangan ekologis. Sumber air habis tersedot oleh pabrik sehingga penduduk mengalami kekeringan, air untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengairi sawah menjadi surut. Demikian pula limbah dari pabrik mencemari sungai dan pembuangan asap menjadi polusi udara yang mengganggu kesehatan penduduk desa.

Desakan ekonomi karena sebagian penduduk tidak mampu mencari pekerjaan selain bertani, sedangkan produktivitas lahan-lahan pertanian sudah menurun. Beberapa kelompok penduduk memanfaatkan hasil hutan sehingga pada tahun 2000an Gunung Puteri menjadi gundul dan mengakibatkan bencana banjir lumpur di Desa Cisempur. Kerusakan lingkungan yang semakin parah mendorong LSM bersama-sama masyarakat setempat melakukan reboisasi pada akhir tahun 2000an. Pemerintah kemudian menetapkan Gunung Puteri sebagai kawasan konservasi. Saat ini, keberadaan pabrik hanya membawa dampak ekonomi terhadap beberapa kalangan saja, seperti pekerja yang kebanyakan berasal dari luar daerah dan pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan aktivitas pekerja pabrik. Sementara itu, penduduk Desa Cisempur kebanyakan berada pada taraf kesejahteraan yang rendah. Para petani hidup miskin dan banyak pemuda yang menganggur.

Pemberlakuan AEC tentu akan membawa dampak positif maupun negatif bagi desa-desa yang memiliki kondisi serupa dengan Cisempur. Apabila masuknya modal yang menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pabrik, industri, dan perdagangan, tetapi disertai dengan masuknya sumber daya manusia dari luar negara, kondisi kemiskinan di desa akan semakin parah. Kemiskinan dalam industrialisasi di Cisempur menggambarkan lemahnya sumber daya manusia di desa-desa Jawa Barat dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi. Ketidakmampuan sumber daya lokal untuk bersaing mendorong mereka mengeksploitasi sumber daya alam, karena tidak ada lagi sumber mata pencaharian yang dapat dijadikan topangan bagi mereka. Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan potensi AEC supaya tidak aktivitas ekonominya tidak terlalu menekankan pada industrialisasi. Pertumbuhan ekonomi berdasar pada eksploitasi kekayaan sumber daya alam (seperti pabrik besar yang mendominasi mata air) oleh perusahaan besar perlu dihindari. Keunikan ekonomi masyarakat lokal dengan segala potensi kekayaan alamnya perlu diberdayakan supaya dapat memanfaatkan momentum AEC.

Kesimpulan

Pemberlakuan AEC yang akan dimulai pada akhir tahun 2015 bermaksud untuk meningkatkan ketahanan daya ekonomi masyarakat dengan cara membuat pasar dan konsumen regional. Keberhasilan dari upaya tersebut akan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya masyarakat di tingkat lokal. Provinsi Jawa Barat kaya akan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian regional melalui pemberlakuan AEC. Namun demikian, selain potensi juga terdapat ancaman dan tantangan yang perlu diatasi supaya AEC benar-benar membawa dampak yang positif terutama terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pertama, diperlukan perangkat regulasi di Jawa Barat yang mencegah eksploitasi tenaga kerja. Dengan masuknya modal untuk meningkatkan produksi, maka perusahaan akan berfokus pada perolehan keuntungan finansial dengan cara menekan biaya produksi. Kedua, konsep pembangunan poverty-environment mainstream perlu diterapkan untuk meredam segala dampak dari pembangunan ekonomi akibat arus modal yang masuk dan memicu kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kerusakan lingkungan desa-desa di Jawa Barat. Dampak yang perlu diperhatikan terutama kerusakan lingkungan, mengingat banyak desa terletak di kawasan konservasi, bentangan alam, sekitar kawasan sungai. Kerusakan lingkungan, misalnya kawasan sungai yang digunakan perkebunan akan meningkatkan erosi dan menyebabkan bencana banjir. Ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang bukan hanya berdaya saing tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya lokal. Pemberlakuan AEC perlu diarahkan untuk sebagai solusi atas berbagai masalah di desa Jawa Barat seperti kemiskinan, kesenjangan, dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, AEC diperlakukan sebagai peluang untuk mengakselerasi upaya pemerintah mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Referensi

Asra, A., Estrada, G. E., & Pernia, E. M. (2005). ASEAN Economic Community: Implication for Poverty Reduction in South East Asia. In D. H. Wei-Yen (Ed.), *Roadmap to an ASEAN Economic Community.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Bandung.bisnis.com. (2014, February 25). Ini Daftar Kerusakan Lingkungan di Jawa Barat | Bandung. Retrieved August 8, 2015, from http://bandung.bisnis.com/read/20140225/6/497385/ini-daftar-kerusakan-lingkungan-di-jawa-barat

Bappeda Provinsi Jawa Barat. (2014). *Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2025.* Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat. Retrieved from

http://bappeda.jabarprov.go.id/assets/images/upload/paparan/FI NAL%20-%20PAPARAN%20KA.%20BAPPEDA%20RPJMD%202013-2018,%2015%20JULI%202013%20PKL%2002.00%20WIB.pdf

Beritasatu.com. (2012, January 2). BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Jabar Bertambah | Suara Pembaruan. Retrieved August 7, 2015, from http://sp.beritasatu.com/home/bps-jumlah-penduduk-miskin-di-jabar-bertambah/15451

BPS. (2014a). Gini Rasio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2007-2013. Retrieved August 9, 2015, from http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1493

BPS. (2014b). Statistics Indonesia. Retrieved August 7, 2014, from http://www.bps. go. id/tab_sub/view.php?tabel=l&id_subyek=23&notab=

1

Brewster, H. (2013). CARICOM Single Market and Economy: Assesment of the Region's Support Needs. In K. H. M. Chuck-A-Sang (Ed.), *The Caribbean Single Market and Economy: Towards a Single Economic Space.* USA: Trafford Publishing.

Centre, A. S. (2009). *ASEAN Economic Community Blueprint.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Coninck, S. de. (2009). *Mainstreaming Poverty-environment Linkages Into Development Planning: A Handbook for Practitioners.* UNEP/Earthprint.

Diskominfo.jabarprov.go.id. (2009, April 27). Sebagian Besar Daerah Di Jabar Rawan Bencana Alam | DISKOMINFO JABAR. Retrieved from http://diskominfo.jabarprov.go.id/sebagian-besar-daerah-di-jabar-rawan-bencana-alam/#.VcXbGJ2eDGc

Hageman, H. (2009). Schumpeter on Development. In Y. Jchi Shionoya & T. Nishizawa (Eds.), *Marshall and Schumpeter on Evolution: Economic Sociology of Capitalist Development.* Northampton: Edward Elgar Publishing.

Jabarprov.go.id. (2015, March 6). Realisasi Investasi PMA, Provinsi Jabar Selalu Peringkat Satu. Bandung. Retrieved from

http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/11365/2015/03/06/Realisasi-Investasi-PMA-Provinsi-Jabar-Selalu-Peringkat-Satu

Lloyd, P. J. (2007). What is Single Market: The Application to the Case of ASEAN. In D. H. Wei-Yen (Ed.), *Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic Community.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Mangunjaya, F. M. (2006). *Hidup harmonis dengan alam: esai-esai pembangunan lingkungan, konservasi, dan keanekaragaman hayati Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mumma, A., & Smith, S. (2012]. Introduction. In A. Mumma & S. Smith (Eds.), *Poverty Alleviation and Environmental Law*. Glos & Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

Pikiran-rakyat.com. (2012, Desember]. Kerusakan Lingkungan di Jabar Semakin Memprihatinkan. Retrieved August 8, 2015, from http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2012/12/31/217077/kerusakan-lingkungan-di-jabar-semakin-memprihatinkan

Plummer, M. G., & Yue, C. S. (2009a). Benefit of the AEC. In M. G. Plummer & C. S. Yue (Eds.), *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Plummer, M. G., & Yue, C. S. (2009b). Introduction. In M. G. Plummer & C. S. Yue (Eds.), *Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Pushpanathan, S. (2012). ASEAN's Readiness in Achieving the AEC 2015: Prospects and Challenges. In S. B. Das (Ed.), *Achieving the ASEAN Economic Community 2015: Challenges for Member Countries & Business.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

APEX™

Certificate of Participation

This is to certify that

Mohamad Fadhil Nurdin

has presented a paper in

USM INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 2015 (USM-ICOSS 2015)

on

27-28 AUGUST 2015

at

RAINBOW PARADISE BEACH RESORT, PENANG

organized by

SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Assoc. Prof. Dr. Nor Malina Malek
Dean
School of Social Sciences
Universiti Sains Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Intan Hashimah Mohd Hashim
Chairperson
Organizing Committee
USM-ICOSS 2015